TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI SATU DATA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Magister Ilmu Administrasi Publik

Disusun Oleh :

HISHNUL ISLAMY

NIM. 501363151

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2025

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

Tugas Akhir Program Magister yang berjudul *Implementasi Satu Data Kabupaten Lombok Timur* adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Lombok Timur, 13 Desember 2025

Yang Menyatakan,



Hishnul Islamy
NIM 501363151

Abstrak

Transformasi digital pemerintahan menuntut tersedianya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar pengambilan kebijakan publik. Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menjadi instrumen penting dalam memperbaiki tata kelola data pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Lombok Timur. Namun, dalam implementasinya masih ditemui berbagai permasalahan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD), keterbatasan infrastruktur teknologi, serta belum terintegrasinya aplikasi pengelolaan data.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Satu Data di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaannya, serta merumuskan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi Sekretariat Satu Data, Walidata, Pembina Data, produsen data pada OPD, akademisi, media, sektor swasta, dan masyarakat pengguna data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Satu Data di Kabupaten Lombok Timur telah berjalan namun belum optimal. Pada dimensi komunikasi, masih ditemukan kendala dalam transmisi dan konsistensi informasi antar OPD. Dari sisi sumber daya, keterbatasan kompetensi ASN di bidang statistik dan pengelolaan data serta keterbatasan fasilitas teknologi menjadi hambatan utama. Pada dimensi disposisi, pelaksana pada umumnya memiliki komitmen yang baik, namun belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman teknis yang memadai. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan fragmentasi kelembagaan menyebabkan koordinasi dan integrasi data belum berjalan efektif. Faktor pendukung implementasi meliputi adanya dasar hukum yang jelas, komitmen pimpinan daerah, serta dukungan kelembagaan dari walidata dan pembina data.

Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Kebijakan Satu Data di Kabupaten Lombok Timur sangat ditentukan oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan mekanisme komunikasi dan koordinasi lintas OPD, pengembangan infrastruktur teknologi, serta penyusunan SOP yang terintegrasi. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola data daerah sebagai fondasi dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: implementasi kebijakan, Satu Data Indonesia, tata kelola data, pemerintah daerah, Kabupaten Lombok Timur

Abstract

Digital government transformation requires the availability of accurate, up-to-date, integrated, and accessible data as a foundation for evidence-based public policy making. The Satu Data Indonesia (SDI) policy, regulated under Presidential Regulation Number 39 of 2019, serves as a strategic instrument to improve government data governance, including at the local government level such as East Lombok Regency. However, its implementation still faces several challenges, including limited human resource capacity, weak inter-agency coordination, inadequate technological infrastructure, and fragmented data management applications.

This study aims to analyze the implementation of the One Data policy in the Government of East Lombok Regency, identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. and formulate solutions to address existing obstacles. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. Research informants include the One Data Secretariat, Data Custodians, Data Supervisors, data-producing regional government agencies, academics, media representatives, private sector actors, and public data users.

The findings indicate that the implementation of the One Data policy in East Lombok Regency has been initiated but has not yet been fully optimal. In terms of communication, shortcomings remain in information transmission and consistency among government agencies. Regarding resources, the limited statistical and data management competencies of civil servants, along with insufficient technological facilities, constitute major constraints. From the disposition dimension, implementers generally demonstrate a positive commitment; however, this is not fully supported by adequate technical understanding. Meanwhile, within the bureaucratic structure dimension, the absence of standardized operating procedures and institutional fragmentation hinder effective coordination and data integration. Supporting factors include a clear legal framework, strong commitment from local leadership, and institutional support from data custodians and supervisors.

The study concludes that the successful implementation of the One Data policy in East Lombok Regency depends heavily on strengthening human resource capacity, improving inter-agency communication and coordination mechanisms, developing technological infrastructure, and establishing integrated standard operating procedures. The findings underscore the importance of strengthening local data governance as a foundation for data-driven development planning and improved public service delivery.

Keywords: *policy implementation, One Data Indonesia, data governance, local government, East Lombok Regency*

UNIVERSITAS TERBUKA

SEKOLAH PASCASARJANA

LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama	:	Hishnul Islamy
NIM	:	501363151
Program Studi	:	Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Judul TAPM	:	Implementasi Satu Data Lombok Timur

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal	:	Senin, 9 Februari 2026
Waktu	:	10.40 – 12.10 WIB

dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji — Tanda Tangan

Nama : Dr. Irsanti Widuri Asih, S.Sos., M.Si

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Sampara Lukman, M.A.

Penguji I

Nama : Dr. Heri Wahyudi, S.Sos., M.Si.

Penguji II

Nama : Dr. Sofjan Aripin, M.Si.

PERSETUJUAN TAPM PASCAUJIAN SIDANG

Judul TAPM	:	Implementasi Satu Data Lombok Timur
Penyusun TAPM	:	Hishnul Islamy
NIM	:	501363151
Program Studi	:	Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Hari/Tanggal	:	Senin, 9 Februari 2026

Menyetujui :

Pembimbing II,

Dr. Sofian Aripin, M.Si.
NIP/NIDN 196606191992031002

Pembimbing I,

Dr. Heri Wahyudi, S.Sos., M.Si.
NIP/NIDN 197105112006041002

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Program Magister Ilmu Administrasi

Prof. Dr. Siti Aisyah, M.Si.
NIP. 196806121999032001

Direktur
Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si.
NIP. 196305091989031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul *Implementasi Satu Data Kabupaten Lombok Timur* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Terbuka.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka, atas dukungan dan kebijakan yang memungkinkan saya menyelesaikan studi ini.
2. Kepala UPBJJ-UT Mataram, atas pelayanan dan fasilitasi akademik selama proses perkuliahan.
3. Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik, atas dukungan dan tanggung jawab akademik yang diberikan selama masa studi.
4. Bapak Dr. Heri Wahyudi, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Sofjan Aripin, M.Si. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, dan perhatian yang sangat berarti dalam penyusunan TAPM ini.
5. Para informan penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi serta data yang sangat diperlukan dalam penyusunan tesis ini.

6. Istri tercinta, Baiq Maulida Riska Farisa, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, kesabaran, dan motivasi selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
7. Keluarga besar penulis, yang selalu memberikan dukungan, pengertian, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan lancar.
8. Seluruh rekan kerja penulis, atas dukungan, kerja sama, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Lombok Timur, Desember 2025

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, R., Schneider, J., & vom Brocke, J. (2019). Data governance: A conceptual framework, structured review, and research agenda. International Journal of Information Management, 49(July), 424–438. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.07.008

Adinegoro, B., Ruhuputy, M. F., Pambudi, I., & Arrahman, T. (2025). Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah Antitesis Semangat Keterbukaan Dan Informasi Publik. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Volume 16, Nomor 1, Januari 2025*, 1-11.

Affrian, R. (2023). *Model-Model Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan.* CV. Bintang Semesta Abadi.

Alhassan, I., Sammon, D., Daly, M., Alhassan, I., Sammon, D., & Daly, M. (2019). Critical Success Factors for Data Governance : A Theory Building Approach Critical Success Factors for Data Governance : A Theory Building Approach. Information Systems Management, 36(2), 98–110. https://doi.org/10.1080/10580530.2019.1589670

Al-Ruithe, M., Benkhelifa, E., & Hameed, K. (2019). A systematic literature review of data governance and cloud data governance. Personal and Ubiquitous Computing, 23(5), 839–859. https://doi.org/10.1007/s00779017-1104-3

Anggara, S. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik.* CV. Pustaka Setia.

Arief, M., & Muthmainnah, A. N. (2021). Data Journalist : One Data Indonesia (SDI) Weak of Data. *Jurnal Spektrum Komunikasi Vol. 9 No. 2 Desember 2021*, 195-202.

Aripin, S., & Daud, M. (2013). Peran Administrator Publik Dalam Formulasi Dan Implementasi Kebijakan (Analisis Kurikulum 2013). *Jurnal Administrasi Publik*, 1-15.

Bappenas. (2019). Peran Satu Data Indonesia dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka The Role of Satu Data Indonesia to Propel the Practices of Open Government. Retrieved from https://ogi.bappenas.go.id/assets/OGITALK_4_ogi_news.pdf

Donker, F. W., & Loenen, B. Van. (2016). How to assess the success of the open data ecosystem ? International Journal of Digital Earth, 8947(September). https://doi.org/10.1080/17538947.2016.1224938

European data portal. (2018). Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders. European Commission. Retrieved from https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/european_data_portal__open_data_goldbook.pdf

Fattah, H. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi.* Jakarta: Rajawali Pers.

Febriansyah, M. (2022). Implementasi Kebijakan Satu Data Dalam Memyediakan Basis Data Yang Akurat Dan Transparan Di Provinsi Sumatera Selatan (Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera). *Administrasi Publik*, 1-21.

Handoyo. (2012). *Kebijakan Publik.* Semarang: Widya Karya.

III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy.* Washington DC: CQ Press.

Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika, Media dan Informatika*, 13-23.

ITU. (2019). Digital Skills Insights 2019. International Tellecommunication Units.

Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan* . Ung Press.

Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis.* Jakarta: Erlangga.

Mahmud, T. A., Myrna, R., Rusli, B., & Sumaryana, A. (2022). Service Quality of Satu Data in Banten Province, Indonesia. *IAPA 2021 Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration Volume 2022*, 811-821.

Maulidya, R., & Rozikin, M. (2022). Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 273-287.

Meter, V., & Horn, V. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Miles, M., Huberman, & Saldaña. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi).* Jakarta: UI Press.

Nasution, D. A. (2023). *Metode penelitian kualitatif.* Bandung: Harfa Creative.

Nielsen, O. B., Persson, J. S., & Madsen, S. (2019). Why Governing Data Is Difficult : Findings from Danish Local Government. International Federation for Information Processing, 1, 15–29. https://doi.org/10.1007/978 3-030-04315-5

Nugroho, Y. (2017). After Data Synchronising and Sharing - What Do We Learn? Lesson from Satu Data. Jakarta: Kantor Staf Presiden RI.

OGP, & Patra, R. (2020). Mekanisme Pelaporan Independen (IRM): Laporan Perancangan Indonesia 2018 – 2020. Open Government Partnership.

Open Data Unit. (2017). Open Data Strategy 2017 -2022. Dublin.

Parlak, B., & Caner, K. D. (2022). *The Handbook of Public Administration.* Livre de Lyon.

Pasolong, H. (2022). *Teori Administrasi Publik.* Alfabeta.

Patton, M. Q. (1980). *Qualitative Evaluation Methods.* Beverly Hills: CA: Sage Publications.

Purwanto, A., Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2020). Citizen engagement with open government data. Transforming Government: People, Process and Policy, 14(1), 1–30. https://doi.org/10.1108/TG-06-2019-0051

PPN/BAPPENAS, K. (2022). *Rencana Aksi Satu Data Indonesia.* Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS.

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.* UNSRI Press.

Retnowati, Manongga, D. H. F., & Sunarto, H. (2018). Prinsip-Prinsip Open Government Data. Proceeding on Conference on Electrical Engineering, Telematics, Industrial Technology, and Creative Media, 25–29.

Riant Nugroho. (2009). *Public Policy.* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Ribcalia, Suprapto, Feronica, Alalsan, Mustanir, Wandan, . . . Anggelina. (2023). *Kebijakan Publik : Teori, Formulasi dan Aplikasi.* PT. Global Eksekutif Teknologi.

Shafritz, J. M., Russell, E., & Hyde, A. (2017). *Introducing Public Administration (Edisi ke-9)*. Routledge.

Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sianipar, R., Marta, A., & Wahyudi, H. (2025). Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 1 Januari 2025 p-ISSN : 2745-7141 e-ISSN : 2746-1920*, 91-100.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Surmayadi. (2005). *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: Refika Aditama.

Susniwati, & Zamili, M. (2022). Acceleration of One Indonesian Data through Collaborative Governance in Indonesia. *Publik (Jurnal Ilmu Adminsitrasi) Publik (Jurnal Ilmu Adminsitrasi)* , 166-177.

Stewart, D. (2020). Independent Reporting Mechanism (IRM): Australia Design Report 2018 – 2020.

Syaukani, Gaffar, A., & Rasyid. (2004). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Penerbit Alfabeta.

Wicaksono, B., Rusdianto, D. S., & Brata, A. H. (2018). Pengembangan Sistem Portal Satu Data Indonesia Pada Kantor Staf Presiden Menggunakan Comprehensive Kerbal Archieve Network (CKAN). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer, 2(8), 2882–2888.